

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan Perancangan

1.1.1 Rendahnya tingkat pendidikan di Aceh

Pendidikan merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, karena pendidikan menjadi kunci untuk kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Rendahnya kualitas pendidikan dapat menyebabkan rendahnya tingkat produktifitas yang berakibat pada buruknya perekonomian dan rendahnya kualitas kehidupan bangsa.

Dunia pendidikan di Aceh masih mengalami banyak masalah, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai dan rendahnya mutu pendidikan di segala jenjang pendidikan.

Presentase penduduk yang tidak/belum tamat SD berjumlah 19,55%, yang menamatkan SD berjumlah 27,73%, yang menamatkan SLTP berjumlah 20,10%, yang menamatkan SLTA berjumlah 25,34%, penduduk yang diploma berjumlah 2,90%, yang sarjana berjumlah 4,14%, dan yang menamatkan magister hanya 0,24%. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk Aceh banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik itu diploma, sarjana maupun magister. Dapat juga ditarik kesimpulan bahwa masih banyak penduduk Aceh yang tidak mengalami pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA.

Data BPS Aceh menunjukkan bahwa 6,10% penduduk Aceh tidak/belum pernah sekolah, 32,01% masih sekolah, dan 61,90% tidak bersekolah lagi. Dari hasil data di atas didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh tidak bersekolah formal lagi artinya diperlukannya infrastruktur pendidikan informal untuk memudah akses ke ilmu pengetahuan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat Aceh.

1.1.2. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di Aceh

Rendahnya tingkat pendidikan di Aceh diikuti dengan minimnya sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Berdasarkan data BPS Aceh bahwa sarana dan prasarana di Aceh masih sangat minim. Hal ini dibuktikan bahwa tidak semua kabupaten/kota memiliki perpustakaan umum, dan untuk perpustakaan perguruan tinggi hanya 8 kabupaten/kota yang memiliki dan 15 kabupaten/kota yang lain tidak.

Dengan banyaknya penduduk Aceh yang tidak sekolah dan tidak melanjutkan perguruan tinggi, salah satu solusi untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan adalah dengan diperbanyaknya pendidikan informal melalui pengadaan sarana dan prasarana yang baik seperti perpustakaan.

1.1.3 Padang Meurantee sebagai pusat pendidikan di Aceh Barat Daya

Pada tahun 1959, kompleks pendidikan pusat Aceh diresmikan oleh Gubernur Aceh (Bapak Ali Hasyimi) dengan didirikannya dua universitas yaitu Universitas Syiah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jami'ah Ar-Raniry di Darussalam, Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala dikenal sebagai pusat pendidikan tinggi yang bersifat umum, dan IAIN dikenal sebagai pusatnya kajian keagamaan, khususnya Islam. Pada saat itu telah dicanangkan daerah padang meurantee sebagai kompleks pendidikan kedua di Aceh namun tidak terlaksana karena jauh dari pusat kabupaten Aceh Selatan.

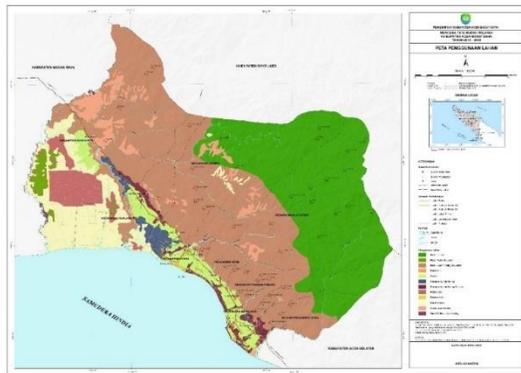
Pada tanggal 10 Juni 2002 Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) diresmikan melalui UU no.4 tahun 2002 dan terpisah dari Kabupaten induknya Aceh Selatan. Wacana pemekaran kabupaten tersebut telah berkembang sejak 1960 pada era Gubernur Ali Hasyimi dan diproses lebih lanjut oleh tokoh – tokoh kabupaten pada tahun 1998 dan baru dapat diresmikan pada tahun 2002.

Wacana kompleks pendidikan pada tahun 1960 di Padang Meurantee kembali dicanangkan dan dilaksanakan oleh kabupaten ABDYA. Terbukti dengan didirikannya 3 sekolah unggul kabupaten yaitu SMAN Harapan Persada, SMAN Tunas Bangsa dan SMK Negeri Aceh Barat Daya serta 3 sekolah tinggi yaitu Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu

Pendidikan (STKIP), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIP) dan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat Daya yang sedang dalam pembangunan.

1.1.4 Gambaran umum geografis di Aceh Barat Daya

Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya secara geografis terletak di bagian barat selatan Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 3°34'24" - 4°05'37" Lintang Utara dan 96°34'57" - 97°09'19" Bujur Timur dengan Ibukota Blangpidie. Sampai dengan tahun 2013 Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Desa atau Gampong. Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Selatan, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat dengan Kabupaten Nagan Raya. Luas Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1.882,05 Km².



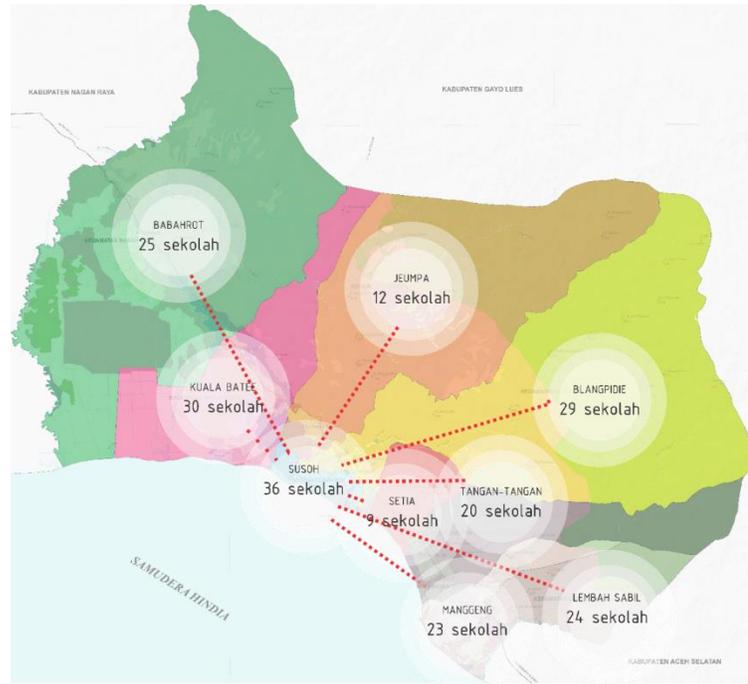
Gambar 1.1. Peta Tata Guna Lahan Aceh Barat Daya

Sumber: Bappeda Aceh Barat Daya

1.1.5 Persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten paling banyak dimiliki dari seluruh kecamatan yaitu kecamatan Susoh berjumlah 36 gedung, disusul oleh kecamatan Kuala Batee berjumlah 30 gedung, kemudian kecamatan Blangpidie 29 gedung terus menurun sampai kecamatan Setia yang hanya berjumlah 9 gedung. Padahal jika dilihat dari luas lahan berdasarkan peta, kecamatan Susoh tidak lebih besar dari kecamatan Setia tetapi

secara infrastruktur pendidikan jauh lebih banyak kecamatan Susoh dibanding kecamatan Setia.



Gambar 1.2. Persebaran infrasruktur pendidikan

Sumber: Analisis penulis, 2016

1.1.6 Meningkatnya jumlah penduduk dan rendahnya tingkat pendidikan di ABDYA

Jumlah penduduk Aceh Barat Daya pada tahun 2015 yaitu 140.689 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Aceh Barat Daya tiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2015 sebesar 2,21 persen. Pada tahun 2010, penduduk hanya berjumlah 126.036 dan meningkat menjadi 128.922 pada tahun 2011, terus meningkat mencapai 140.689 jiwa pada tahun 2015. Sementara distribusi penduduk terkecil ada di kecamatan Setia, sebesar 5,91 persen. Angka kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Susoh sebesar 1.227 jiwa/km² artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di kecamatan Susoh didiami oleh 1.227 penduduk (BPS Aceh Barat Daya, 2016).

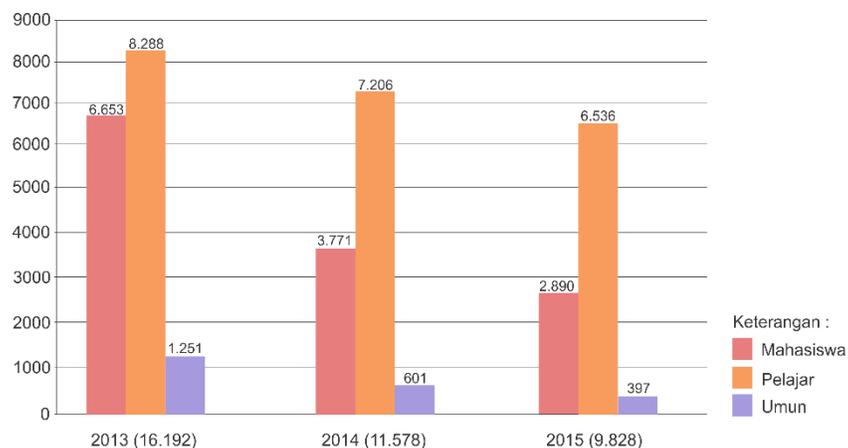
Menurut BPS Aceh tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, paling banyak masyarakat yang menamatkan SD sekitar 35.97 %, yang tidak tamat SD sekitar 21.41 %, yang menamatkan SLTP dan sederajat sekitar 15.35%, yang menamatkan SLTA dan sederajat sekitar 19.64%, yang menamatkan Diploma sekitar 3.60%, yang menamatkan S1 sekitar 3.96% dan S2/S3 hanya 0.06% saja. Jadi jenjang paling tinggi pendidikan formal yang ditamatkan rata – rata masyarakat Abdya adalah sekolah dasar yang berarti bahwa perlunya pendidikan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.1.7 Menurunnya daya minat membaca masyarakat Aceh Barat Daya

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan minat membaca masyarakat skala nasional sangat rendah, karena berdasarkan 61 negara di dunia yang memiliki budaya literatur, kedudukan Indonesia berada pada peringkat nomor 60. ‘Selama ini, minat membaca di Tanah Air sangat rendah, bahkan terbukti orang yang sudah memiliki panduan buku pedoman, namun mereka tidak membacanya. Orang Indonesia lebih suka mengobrol dan berdiskusi daripada harus membaca. Kriteria bangsa yang memiliki literatur itu di antaranya memiliki sarana dan prasarana perpustakaan’.

(www.republika.co.id)

Berdasarkan data dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan yang signifikan (Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, 2016)



Gambar 1.3. Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan tahun 2013 – 2015

Sumber: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Padahal Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik merupakan kabupaten yang mempunyai angka melek huruf yang tinggi, artinya hampir seluruh penduduk Aceh Barat Daya bisa membaca.

Menurut kepala perpustakaan dan arsip daerah Dra. Hj. Ida Aryati bahwa menurunnya minat membaca masyarakat berimplikasi pada menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan umum secara signifikan, dan faktor – faktor yang menyebabkan menurunnya minat membaca di perpustakaan antara lain: 1) Varian buku yang kurang, 2) fasilitas perpustakaan kurang memadai, 3) tidak nyaman di perpustakaan, 4) teknologi digital semakin maju:

1.1.8 Varian buku yang kurang

Varian buku yang dimiliki oleh perpustakaan umum Aceh Barat Daya berkisar 8.218 judul buku dengan jumlah buku 28.563 buah dengan berbagai disiplin ilmu, Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya jumlah murid dari berbagai jenjang adalah 26.734 murid, dengan pembagian Taman kanak kanak berjumlah 2.286 murid, Sekolah Dasar berjumlah 13.389 murid, Sekolah Menengah Pertama berjumlah 6.132 murid, Sekolah Menengah Atas berjumlah 3.928 murid, dan Sekolah Menengah Kejuruan berjumlah 999 murid (BPS Abdya, 2016). Dengan murid total berjumlah 26.734 dan jumlah buku 28.563 artinya setiap murid hanya mampu meminjam 1 – 2 buku dan jika dibandingkan dengan judul buku yang hanya 8.218 dinilai sangat tidak mencukupi kebutuhan murid di Aceh Barat Daya.





Gambar 1.4. Varian buku di perpustakaan Aceh Barat Daya

Sumber: Dokumentasi Penulis

1.1.9 Fasilitas perpustakaan tidak memadai

Kurangnya jumlah buku di perpustakaan umum dikarenakan gedung perpustakaan tidak mempunyai luasan yang cukup untuk menampung banyak buku, perpustakaan umum Aceh Barat Daya hanya mempunyai luasan sekitar 57 m². Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perpustakaan dan arsip daerah, Dra. Hj. Ida Aryati mengatakan bahwa karena tidak mampu menampung buku yang lebih banyak, maka banyak buku yang disumbangkan baik dari bantuan perpustakaan provinsi aceh dan APBK daerah diberikan ke sekolah – sekolah untuk dijadikan perpustakaan sendiri.



Gambar.1.5. Kondisi Perpustakaan Umum Aceh Barat Daya

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Umum yang dikutip oleh HS-Lasa (2008) maka kebutuhan ruang masing – masing jenis perpustakaan umum diatur sebagai berikut:

Tabel 1.1. Standar luasan ruang perpustakaan

No	Jenis Perpustakaan Umum	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	Perpustakaan Daerah Tk. II/Kabupaten/Kotamadya	2000 m2	200 m2
2	Perpustakaan Kecamatan	1000 m2	120 m2
3	Perpustakaan Desa	500 m2	80 m2

Sumber: Hs, Lasa.2008. Manajemen Perpustakaan. Yogyakarta: Gama Media

Dengan luas bangunan 57 m2 maka perpustakaan umum Aceh Barat Daya tidak memenuhi standar ruang perpustakaan tingkat kabupaten bahkan tidak mencapai standar ruang perpustakaan bagi Desa yang mempunyai luas 80 m2

Disamping perpustakaan yang kurang luas dan varian buku yang sedikit, kenyamanan didalam perpustakaan adalah elemen penting yang harus dimiliki perpustakaan umum. Dapat dilihat dibawah ini perbandingan perpustakaan di Aceh Barat Daya dan perpustakaan yang di desain oleh Studio Farris Architect di Brugge, Belgium



Gambar 1.6. Perbandingan kenyamanan perpustakaan Aceh Barat Daya dan City Library Bruges

Sumber: Dokumentasi Pribadi dan archdaily.com

Dapat dilihat banyaknya buku, luas bangunan, dan pencahayaan alami dapat mempengaruhi kenyamanan membaca didalam perpustakaan tersebut. Semakin luas, semakin banyak buku dan pencahayaan alami yang masuk maka semakin baik untuk kenyamanan perpustakaan.

1.1.10 Sosial Budaya Masyarakat Aceh

Masyarakat Aceh memiliki kebudayaan yang unik dan beraneka ragam. Beberapa budaya yang ada sekarang adalah hasil dari akulturasi antara budaya melayu, Timur Tengah dan Aceh sendiri. Adapun beberapa kebudayaan Aceh yang masih bertahan antara lain:

1. Tradisi minum kopi

Masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari kopi. Oleh karena itu, warung kopi akan banyak kita temui di berbagai daerah di provinsi Aceh. Tidak terbatas usia dari muda sampai yang tua, pria maupun wanita, miskin maupun kaya, baik siang maupun malam, berbagai lapisan masyarakat Aceh mengisi warung warung kopi untuk sekedar bersantai, mengerjakan tugas, mengobrol bersama teman atau hanya duduk untuk menikmati kopi. Minum kopi sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat Aceh.

Tradisi minum kopi telah berkembang turun temurun seiring perkembangan Aceh sebagai salah satu daerah produsen kopi kelas dunia. Dari era kolonial Belanda hingga sekarang, setidaknya ada 2 kopi Aceh yang paling terkenal yaitu kopi Ulee Kareng dan kopi Gayo. Kedua kopi inilah yang mengharumkan nama Aceh sebagai salah satu produsen kopi terbaik di tanah air yang merajai 40% pasar dalam negeri (www.indonesiakaya.com)

Seiring berkembangnya zaman, budaya minum kopi di tengah masyarakat Aceh tetap terjaga. Budaya ini turun temurun hingga ke generasi sekarang ini bahkan jauh lebih berkembang. Warung – warung kopi menawarkan kenyamanan dan fasilitas internet (hotspot) untuk menarik masyarakat Aceh untuk betah dalam waktu lama di warung kopi, dengan hanya memesan segelas kopi, masyarakat sudah dapat menikmati kenyamanan dan fasilitas internet seharian secara gratis.



Gambar 1.7. Warung kopi sebagai tempat bersosialisasi dan belajar

Sumber: Google

2. Syari'at Islam

Syariat Islam merupakan peraturan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan hadits bagi umat Islam tidak hanya segi ibadah namun juga bidang sosial, ekonomi, budaya agar tercipta kehidupan teratur, aman sentosa dunia dan akhirat.

Syariat Islam sudah diterapkan di Aceh sejak masih dalam bentuk kerajaan sampai sekarang. Tidak hanya dari segi hukum (pembentukan qanun, dst) namun juga dari kebiasaan – kebiasaan masyarakat menunjukkan syari'at Islam memang diterapkan dalam kehidupan sehari – hari seperti pemakaian hijab bagi wanita dan pakaian dibawah lutut bagi pria sangat diperhatikan serta pengawasan terhadap non muhrim yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan syari'at.



Gambar 1.8. Penegakan Syariat Islam

Sumber: www.bbc.com

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari pemerintah. Adapun lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penerapan syariat Islam

adalah: 1) Dinas Syariat Islam, 2) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), 3) Wilayatul Hisbah dan 4) Mahkamah Syariat. Dinas Syariat Islam mempunyai tanggung jawab utama pelaksanaan hukum syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga independen yang bertugas memberikan masukan dan kritikan terhadap jalannya hukum syariat, dan polisi wilayatul hisbah yang bertugas mensosialisasikan qanun, menangkap pelanggar qanun serta menghukum pelaku yang melanggar syariat (Zulia, 2011).

3. Aceh pasca tsunami

Tsunami 2004 membawa perubahan yang drastis dalam kehidupan masyarakat Aceh. Lahirnya perjanjian damai MoU Helsinki 2005 dan ‘dahsyat’-nya bantuan yang masuk ke Aceh mentransformasikan masyarakat Aceh seperti yang disebut oleh Daniel Bell (1973) sebagai masyarakat informasi. Hal ini tidak lepas dari peran kondisi perpolitikan Indonesia pasca Soeharto dan Aceh pasca *conflict* yang menerima dengan tangan terbuka “kebebasan dan kesetaraan” yang telah lama dirindukan. Kebebasan dan kesetaraan ini pula berbalut dengan globalisasi yang menyebar ke seantero negeri.

[\(http://theglobejournal.com/\)](http://theglobejournal.com/)

Namun kebebasan yang dirindukan selama ini malah mendobrak sendi – sendi norma dan nilai – nilai moralitas masyarakat Aceh yang terpancar pada bentuk perilaku sebagian masyarakat Aceh.

Masjid dan rumah ibadah yang dulu penuh saat masa awal tsunami, kini kalah bersaing dengan pengunjung warung kopi. Kemudian kehidupan remaja pun semakin mengawatirkan dimana banyak pula tempat – tempat wisata bahkan di kafe kafe menjadi area pacaran bagi remaja.

Secara fisik, pembangunan fisik di Aceh sangat berkembang akan tetapi bertolak belakang dengan pembangunan spiritual yang semakin menurun. Pembangunan fisik seharusnya diikuti dengan pembangunan spiritual dimana bangunan – bangunan dan infrastruktur mengadopsi pola kehidupan masyarakat Aceh yang Islami.

4. Budaya berdiskusi dan silaturahmi masyarakat

Menurut Anies Baswedan, orang Indonesia lebih suka mengobrol dan berdiskusi daripada harus membaca, begitu pun orang Aceh. Aceh dikenal dengan sejuta warung

kopi karena kesukaan orang Aceh itu adalah berdiskusi dan mengobrol sambil minum segelas kopi.



Gambar 1.9. Warung kopi sebagai tempat bersilaturahmi

Sumber: <http://kilometerindonesia.blogspot.co.id/>

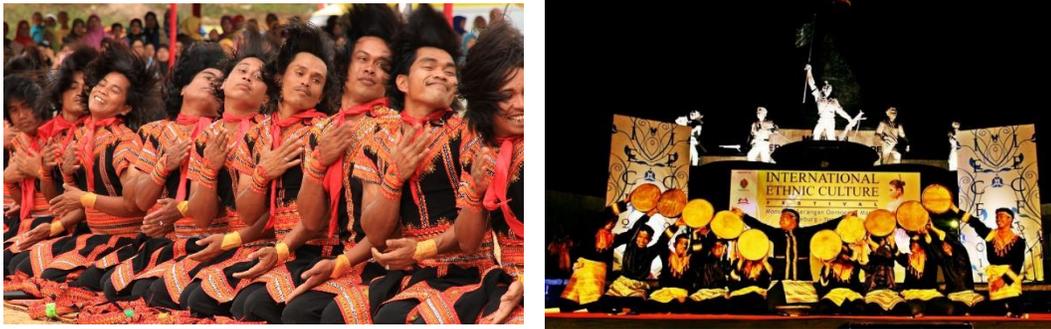
Masyarakat Aceh yang notabene sangat menjaga silaturahmi dan ukhwah Islamiyah sangat senang dengan kebersamaan. Walaupun tidak saling mengenal, saling menyapa dan duduk bersama adalah hal yang lumrah. Suasana yang demikian hanya dapat ditemukan di warung kopi, rasa kebersamaan ditambah dengan senangnya masyarakat Aceh berdiskusi membuat suasana di warung kopi sangat menyenangkan.

5. Kesenian

Corak kesenian Aceh memang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, namun telah diolah dan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku. Seni tari yang terkenal dari Aceh antara lain seudati, seudati inong, dan seudati tunang. Seni lain yang dikembangkan adalah seni kaligrafi Arab, seperti yang banyak terlihat pada berbagai ukiran mesjid, rumah adat, alat upacara, perhiasan, dan sebagainya. Selain itu berkembang seni sastra dalam bentuk hikayat yang bernafaskan Islam, seperti Hikayat Perang Sabil.

Bentuk-bentuk kesenian Aneuk Jamee berasal dari dua budaya yang berasimilasi. Orang Aneuk Jamee mengenal kesenian seudati, dabus (dabuih), dan ratoh yang memadukan unsur tari, musik, dan seni suara. Selain itu dikenal kaba, yaitu seni bercerita tentang seorang tokoh yang dibumbui dengan dongeng.

Suatu unsur budaya yang tidak pernah lesu di kalangan masyarakat Gayo adalah kesenian, yang hampir tidak pernah mengalami kemandekan bahkan cenderung berkembang. Bentuk kesenian Gayo yang terkenal, antara lain tari saman dan seni teater yang disebut Didong. Selain untuk hiburan dan rekreasi, bentuk-bentuk kesenian ini mempunyai fungsi ritual, pendidikan, sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan struktur sosial masyarakat. Di samping itu ada pula bentuk kesenian bines, guru didong, dan melengkap (seni berpidato berdasarkan adat), yang juga tidak terlupakan dari masa ke masa



Gambar 1.10. Tari Aceh

Sumber: <http://kedegayo.blogspot.co.id/>

Keberagaman kebudayaan Aceh ini dapat dimanfaatkan untuk menaikkan minat membaca masyarakat Aceh dengan cara memasukkan unsur – unsur kebudayaan ke dalam perpustakaan, karena secara umum perpustakaan mempunyai peranan yang sangat vital bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertama, sebagai jantung pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kedua, sebagai pusat pengumpulan dan penyimpanan sumber pengetahuan dan informasi. Ketiga, sebagai social center, yaitu pusat kegiatan masyarakat setempat. Perpustakaan umum mempunyai peran sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yaitu sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa

(www.koransawala.com). Adapun menurut Muchyidin (2008: 41-42) perpustakaan dapat membantu masyarakat umum agar:

- a. Dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan
- b. Dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik
- c. Dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik
- d. Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina rohani dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia
- e. Dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari – hari dan lapangan pekerjaannya
- f. Dapat menjadi warga Negara yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling pengertian antar bangsa
- g. Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial

Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting didalam masyarakat. Perpustakaan memiliki peran untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membaca karena dengan membaca masyarakat dapat memperoleh berbagai manfaat yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan.

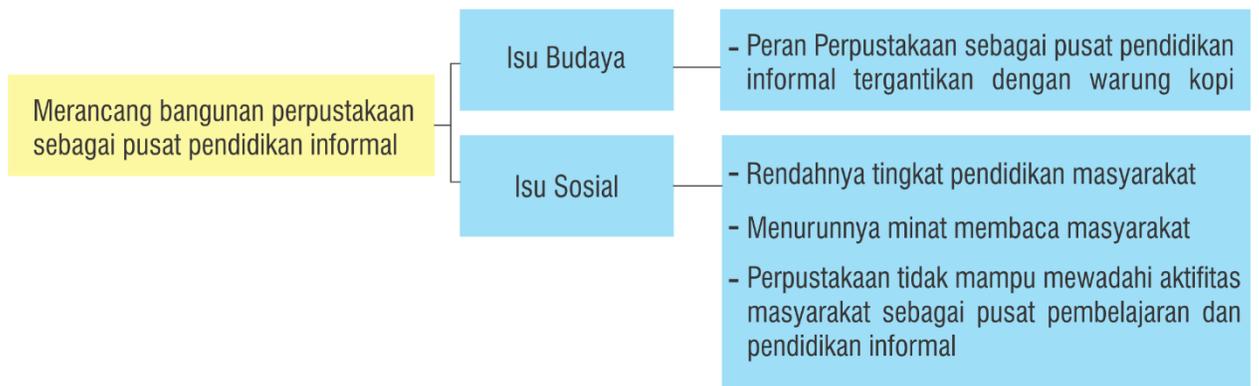
Tidak hanya di dalam negeri bahkan di luar negeri pun, di Swedia perpustakaan umum sudah dianggap sebagai ruang tamu kota bahkan rumah kedua (Warpole, 2002).

Oleh karenanya, dengan berbagai faktor di atas maka dibutuhkan bangunan perpustakaan baru yang mengusung konsep kenyamanan dalam membaca dengan mengintegrasikan kebudayaan masyarakat setempat dan dengan fasilitas baru yang ditawarkan sehingga dapat menambah minat baca masyarakat.

1.2 Isu dan Rumusan Permasalahan

1.2.1 Peta Isu

Isu – isu lokal yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi 2 aspek yaitu isu budaya, dan isu sosial.



Gambar 1.11. Isu – Isu Lokal

Sumber: Analisa penulis, 2016

Berdasarkan hasil observasi terdapat isu – isu yang berkembang di lokasi perancangan, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat diikuti dengan rendahnya pembangunan infrastruktur pendidikan. Disamping itu, minat membaca masyarakat pun rendah akibatnya berpengaruh pada kualitas sumber daya masyarakat Aceh. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah perpustakaan yang dapat menjadi pusat pendidikan informal dengan memasukkan unsur sosial budaya (sosiokultur) masyarakat Aceh sebagai pembelajaran dan sosial bagi masyarakat.

1.2.2 Rumusan Permasalahan

Permasalahan umum:

1. Bagaimana merancang perpustakaan sebagai tempat tempat pendidikan informal yang nyaman dengan mengintegrasikan sosial budaya masyarakat Aceh sebagai upaya untuk mendorong minat baca masyarakat.
2. Permasalahan khusus:
 1. Bagaimana merancang perpustakaan yang mempunyai nilai *pleasure of reading* untuk menambah nilai keyamanan dalam pepustakaan
 2. Bagaimana merancang perpustakaan dengan mengintegrasikan kebudayaan masyarakat Aceh sebagai pendorong nilai *pleasure of reading* pada perpustakaan

1.3 Metode Perancangan yang Diajukan

1.3.1 Metode Pengumpulan data

Tabel 1.2. Metode pengumpulan data

DATA PRIMER

NO	JENIS DATA	DATA YANG DI PERLUKAN	KEGUNAAN DATA
1.	Data Survey site perancangan	<p>Hasil survei terhadap persoalan yang terdapat pada site</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data kawasan seperti kebutuhan fasilitas penunjang kawasan pendidikan. • Data sosial budaya masyarakat yang berpengaruh terhadap konsepsi rancangan pleasure of reading 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui permasalahan dari kawasan rancangan dalam mengembangkan analisa rancangan • Mengetahui kebudayaan masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan konsep pleasure of reading

DATA SEKUNDER

NO	JENIS DATA	DATA YANG DI PERLUKAN	KEGUNAAN DATA
	<p>Kajian Literatur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku • Web 	<ul style="list-style-type: none"> • Data mengenai standar ruang dari perancangan perpustakaan • Data mengenai pleasure of reading 	<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan sebagai acuan dalam merancang kebutuhan ruang yang ada diperpustakaan (bab 2, hal 30) • Digunakan sebagai acuan dalam merancang ruang baca yang nyaman berdasarkan aspek – aspek pleasure of reading (bab2, hal 42)

Kajian Presedent <ul style="list-style-type: none"> • Buku • Web 	<ul style="list-style-type: none"> • Data mengenai kebutuhan ruang dan model perancangan perpustakaan yang dapat dikembangkan • Data variabel dari kenyamanan membaca (<i>pleasure of reading</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan indikator dari pengembangan perpustakaan yang pernah dirancang • Variable kenyamanan membaca untuk pengembangan ruang yang diterapkan pada perpustakaan
Government / Stakeholder <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pendidikan • BPS ABDYA • Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Data tata guna lahan kabupaten • Data siswa dan sekolah pertahun • Statistik pengunjung perpustakaan • Data peraturan daerah • Data lokasi dan tapak 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipergunakan sebagai kebijakan dan landasan yang mengikat untuk perancangan perpustakaan

Sumber: Analisa penulis 2016

1.3.2 Metode Penelusuran Persoalan

Metode penelusuran persoalan dilakukan dengan menguraikan dan mengkaji tipologi fungsi perpustakaan dan studi preseden rancangannya untuk mendapatkan kriteria-kriteria *pleasure of reading* serta potensi maupun kendala konteks lokasi dan tapak sehingga dapat diidentifikasi persoalan rancangan sebagai konflik kriteria/potensi dan kendala yang harus dicari solusi rancangannya.

1.3.3 Metode Pemecahan Persoalan

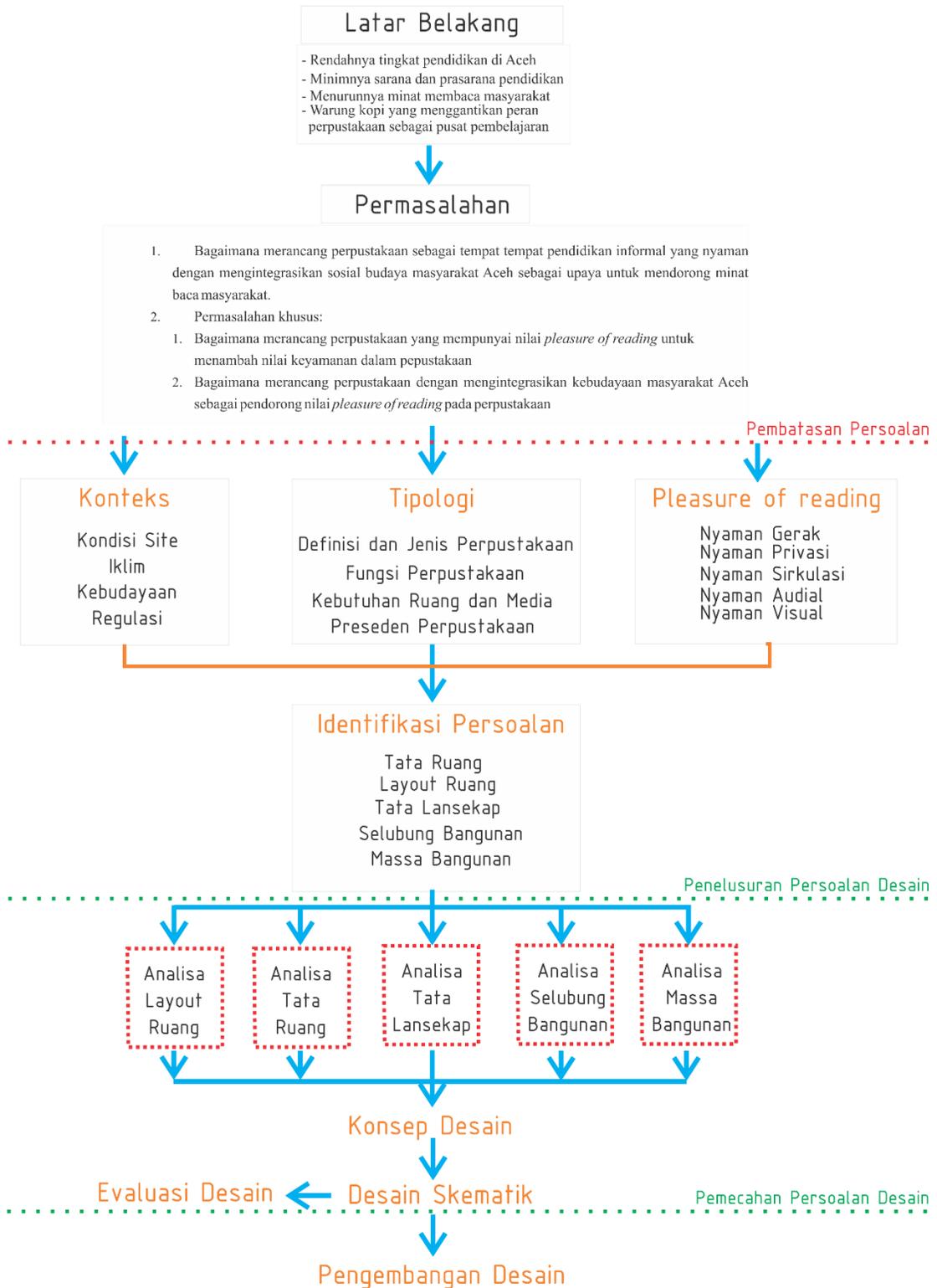
Metode pemecahan persoalan dilakukan dengan cara mengidentifikasi persoalan-persoalan yang didapatkan dalam kajian berupa program arsitektural baik itu program ruang, property size dan program fisik. Setelah persoalan didapatkan maka direkonsiliasi sehingga mendapatkan konsep – konsep yang akan dipakai di dalam rancangan.

1.3.4 Metode Evaluasi Pemecahan

Metode evaluasi yang diajukan adalah:

- Menggunakan software ecotect untuk mengevaluasi daylighting untuk mendapatkan lux sesuai standar perpustakaan menurut SNI untuk kenyamanan visual
- Menggunakan kuesioner untuk mengevaluasi rancangan pleasure of reading dalam konteks tata lansekap dan tata ruang

1.4 Kerangka Berpikir



Gambar 1.12. Kerangka Berpikir

Sumber: Analisis penulis, 2016

1.5 Keaslian Penulisan

1. Judul : Perpustakaan Umum Swasta di Yogyakarta

Penciptaan Ruang Dalam Yang Imajinatif, Edukatif, Rekreasi Melalui Pendekatan Perilaku Pengguna dan Penciptaan Fasad Yang Rekreatif

Oleh : Januar Sidharta, UII

Perbedaan : Pada tugas akhir Januar Sidharta mengenai perpustakaan umum swasta di Yogyakarta yang dilakukan yaitu melalui perpaduan nilai informative, edukatif, dan rekreatif dengan mempertimbangkan perilaku pengunjung. Nilai informative dan edukatif dari fungsi perpustakaan yang memberikan edukasi dan informasi bagi pengunjung disisi lain nilai rekreatif diaplikasikan dalam fasad bangunan. Sedangkan dalam tugas akhir penulis merancang perpustakaan umum daerah dengan berlandaskan *pleasure of reading* yang dilakukan penulis sebagai tolok ukur tercapainya kenyamanan untuk kegiatan perpustakaan terutama kegiatan membaca dengan menggandeng kebudayaan atau kebiasaan umum masyarakat setempat sebagai penambah kenyamanan.

2. Judul : Perpustakaan Swasta Terpadu di Yogyakarta

Penciptaan Tata Ruang Dalam Melalui Pendekatan Multifungsi Guna Memadukan Fungsi-Fungsi Promosi, Retail, Riset dan Pendidikan

Oleh : Himawan Puji Novyanto, UII

Perbedaan : Pada tugas akhir Himawan Puji Novyanto merancang perpustakaan umum swasta terpadu yang multifungsi. Dalam hal multifungsi ini perpustakaan menambahkan fungsi coffeeshop, warnet, wartel dan bookstore untuk mencari keuntungan untuk pembiayaan mandiri bagi kelangsungan pengelolaan perpustakaan. Sedangkan dalam perencanaan perpustakaan umum daerah yang dilakukan penulis mengambil *pleasure of reading* sebagai tolok ukur untuk kenyamanan membaca, fungsi yang dikembangkan adalah ruang baca yang nyaman dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat setempat.

3. Judul : Kawasan Perpustakaan Pintar di Yogyakarta

Penerapan Internet of Things

Oleh : Niki Anggraitan, UII

Perbedaan : Pada tugas akhir Niki Anggraitan merancang kawasan perpustakaan yang terintegrasi dengan Internet of Things. Perpustakaan tidak lagi berupa bangunan individu melainkan sebagai kawasan/ruang. Sedangkan pada perencanaan perpustakaan umum daerah yang dilakukan penulis mengambil pleasure of reading sebagai tolok ukur untuk kenyamanan membaca, fungsi yang dikembangkan adalah ruang baca yang nyaman dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat setempat.